

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dengan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian :

Literatur Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yasin, dkk dengan judul *“Implementation of Indonesia Coal Downstream Policy in the Trend of Fossil Energy Transition”* (C. M. Yasin et al., 2021). Literatur ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan hilirisasi batu bara Indonesia di tengah dinamika transisi energi global yang semakin menekan penggunaan energi fosil. Studi ini menempatkan kebijakan hilirisasi sebagai tanggapan strategis pemerintah Indonesia dalam menghadapi dua tekanan utama sekaligus, yaitu tuntutan peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri dan dorongan internasional menuju energi yang lebih bersih dan keberlanjutan. Dalam kerangka tersebut, melihat hilirisasi batu bara tidak hanya sebagai kebijakan ekonomi-industrial, tetapi juga sebagai bagian dari strategi adaptif negara untuk mempertahankan relevansi batu bara dalam bauran energi nasional di tengah menurunnya legitimasi global terhadap energi fosil.

Topik utama yang dibahas dalam penelitian ini mencakup arah kebijakan hilirisasi batu bara, hambatan implementasi di tingkat nasional, serta keterkaitannya dengan agenda transisi energi fosil. Studi ini menyoroti bahwa meskipun Indonesia berkomitmen terhadap pengurangan emisi dan transisi energi, batu bara masih diposisikan sebagai sumber energi strategis dalam jangka menengah, terutama untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi domestik. Dalam lingkup ini, hilirisasi dipahami sebagai upaya untuk menggeser orientasi pemanfaatan batu bara dari sekadar ekspor bahan mentah menuju pengembangan produk turunan bernilai tambah, seperti gasifikasi batu bara dan substitusi energi impor. Pendekatan ini memperlihatkan adanya paradoks kebijakan, di mana transisi energi tidak hanya berarti penghapusan batu bara, melainkan transformasi cara pemanfaatannya.

Temuan penting dalam literatur ini mencakup beberapa aspek yaitu, pertama, kebijakan hilirisasi batubara dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan infrastruktur dan regulasi yang memadai. Kedua, terdapat hambatan signifikan terhadap dampak lingkungan seperti, emisi karbon dan penggunaan lahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kebijakan hilirisasi dengan strategi energi terbarukan dapat memberikan solusi pada keberlanjutan transisi energi. Hambatan dalam implementasi kebijakan mencakup resistensi dari industri dan kurangnya sumber daya manusia. Dan yang ketiga, terdapat peluang investasi di sektor hilirisasi, terutama pada pengembangan teknologi yang lebih efisien.

Sehingga literatur ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hilirisasi batu bara di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan institusional. Kendala tersebut meliputi ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor batu bara mentah, keterbatasan infrastruktur dan teknologi hilir, serta belum optimalnya sinkronisasi antara kebijakan energi, industri, dan perdagangan. Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hilirisasi tetap memiliki potensi strategis sebagai sarana untuk menjaga ketahanan energi dan meningkatkan nilai ekonomi batu bara di tengah tekanan global terhadap energi fosil. Dalam kerangka ini, dinilai bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada konsistensi kebijakan negara dan kemampuannya dalam mengelola transisi secara bertahap tanpa menimbulkan guncangan ekonomi.

Studi ini tidak hanya melihat hilirisasi sebagai kebijakan industri domestik, tetapi juga sebagai strategi politik-ekonomi negara dalam mempertahankan posisi tawar batu bara Indonesia di tengah perubahan lanskap energi internasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur yang mengkaji kebijakan energi dari perspektif adaptasi negara terhadap tekanan global, khususnya bagi negara berkembang yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam fosil. Namun demikian, meskipun penelitian ini memberikan analisis yang kuat mengenai hilirisasi dalam lingkup transisi energi, terdapat keterbatasan yang sekaligus menjadi celah penelitian. Penelitian ini belum secara spesifik mengkaji bagaimana kebijakan hilirisasi dan kebijakan pendukung lainnya, seperti

kebijakan DMO berdampak langsung terhadap dinamika perdagangan batu bara Indonesia dengan negara mitra utama, terutama Jepang. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada lingkup kebijakan domestik dan global secara makro, tanpa menguraikan implikasi kebijakan tersebut terhadap hubungan perdagangan bilateral dan tanggapan negara pengimpor batu bara.

Dalam lingkup perdagangan batu bara Indonesia dan Jepang, gap tersebut menjadi signifikan. Jepang merupakan salah satu importir utama batu bara Indonesia dan memiliki kepentingan strategis terhadap stabilitas pasokan energi. Kebijakan DMO dan hilirisasi berpotensi mengubah volume, pola, dan karakter perdagangan batu bara antar kedua negara. Aspek ini lah yang belum dielaborasi secara mendalam dalam penelitian Yasin et al. sehingga membuka ruang bagi penelitian ini untuk melengkapi dan memperluas analisis yang telah ada. Penelitian yang ini memposisikan kebijakan hilirisasi dan DMO tidak hanya sebagai tanggapan terhadap transisi energi, tetapi juga sebagai sarana negara dalam mengatur relasi perdagangan dan posisi tawar Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Jepang.

Persamaan penelitian ini dapat di lihat dari fokus kajian terhadap kebijakan hilirisasi batu bara dan peran negara dalam mengelola sumber daya energi strategis. Keduanya sama-sama memandang kebijakan hilirisasi sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan menjaga kepentingan domestik di tengah dinamika global. Selain itu, kedua kajian juga menggunakan pendekatan analitis yang menempatkan kebijakan energi dalam lingkup ekonomi politik yang lebih luas.

Adapun perbedaannya terletak pada titik tekan analisis dan ruang lingkup kajian. Penelitian oleh Yasin berfokus pada hilirisasi dalam kerangka transisi energi fosil secara global dan implikasinya bagi kebijakan nasional Indonesia. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji dampak kebijakan DMO dan hilirisasi terhadap dinamika perdagangan batu bara Indonesia dan Jepang, dengan menempatkan hubungan bilateral dan kepentingan negara pengimpor sebagai variabel penting dalam analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan diskursus mengenai hilirisasi, tetapi juga memberikan perspektif baru

mengenai bagaimana kebijakan domestik Indonesia berinteraksi dengan struktur perdagangan internasional dan kepentingan energi negara mitra.

Melalui pemetaan literatur ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian oleh Yasin memberikan fondasi konseptual yang kuat dalam memahami hilirisasi batu bara di tengah transisi energi, sementara penelitian yang sedang diteliti ini berupaya mengisi kekosongan analitis dengan menyoroti dimensi perdagangan bilateral dan kebijakan DMO sebagai variabel kunci. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan aplikatif dalam memahami implikasi kebijakan energi Indonesia terhadap hubungan perdagangan batu bara dengan Jepang.

Literatur Kedua yaitu yang ditulis oleh Walid dan Haykal dengan judul **"Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation Batubara dan Energi Terbarukan"** (walid siagian & haykal, 2024). Literatur ini secara khusus mengkaji bagaimana kebijakan DMO dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia dan keterkaitannya dengan pengembangan energi terbarukan. Kebijakan DMO salah satunya, yang di mana bertujuan untuk memastikan pasokan cadangan batubara terpenuhi untuk kebutuhan domestik sebelum diekspor. Selain itu adanya hambatan yang dihadapi dalam transisi energi, yang di mana Indonesia masih memiliki ketergantungan pada batubara. Studi ini menempatkan DMO sebagai sarana kebijakan strategis yang digunakan negara untuk menjamin ketersediaan energi domestik, terutama dalam sektor ketenagalistrikan, di tengah dinamika pasar energi global dan komitmen Indonesia terhadap transisi energi. Dalam analisisnya, Walid dan Haykal menyoroti bagaimana DMO berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara kepentingan ekspor batu bara dan kebutuhan energi dalam negeri, sekaligus sebagai refleksi peran negara yang dominan dalam mengatur sektor energi strategis.

Topik utama yang dibahas dalam penelitian ini mencakup desain kebijakan DMO batu bara, implikasinya terhadap ketahanan energi nasional, serta relasinya dengan agenda pengembangan energi terbarukan. Walid dan haykal menekankan bahwa DMO bukan sekadar kebijakan teknis untuk menjamin pasokan batu bara bagi pembangkit listrik, melainkan bagian dari strategi energi nasional yang lebih

luas. Dalam lingkup ini, DMO dipandang sebagai sarana transisi yang memungkinkan Indonesia tetap memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi utama dalam jangka menengah, sembari secara bertahap mendorong diversifikasi energi menuju sumber yang lebih bersih. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan energi Indonesia bersifat gradual dan pragmatis, dengan mempertimbangkan realitas ketergantungan domestik terhadap batu bara.

Temuan penting pada literatur ini yaitu bahwa implementasi kebijakan DMO memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas pasokan dan harga energi domestik, khususnya bagi sektor kelistrikan. Kebijakan ini dinilai efektif dalam melindungi kepentingan domestik dari volatilitas harga batu bara global dan orientasi ekspor perusahaan tambang. Namun demikian, penelitian ini juga menggarisbawahi adanya hambatan struktural, seperti potensi distorsi pasar dan ketegangan antara kepentingan negara dan pelaku usaha. Dalam kerangka kebijakan energi nasional, DMO diposisikan sebagai kebijakan korektif terhadap mekanisme pasar yang dinilai tidak sepenuhnya mampu menjamin ketahanan energi nasional.

Studi ini tidak melihat DMO secara terpisah sebagai kebijakan sektor batu bara semata, tetapi mengkaitkannya dengan arah transisi energi Indonesia secara keseluruhan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami DMO sebagai kebijakan transisional yang menjembatani ketergantungan pada energi fosil dan upaya pengembangan energi terbarukan. Perspektif ini memperkaya literature kebijakan energi yang selama ini cenderung memisahkan diskursus energi fosil dan energi terbarukan.

Meskipun demikian, penelitian Walid dan Haykal memiliki keterbatasan yang membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut. Studi ini belum secara spesifik mengkaji implikasi kebijakan DMO terhadap hubungan perdagangan internasional Indonesia, khususnya dengan negara mitra utama seperti Jepang. Analisis yang dilakukan lebih berfokus pada dampak domestik DMO terhadap ketahanan energi dan kebijakan energi nasional, tanpa menelusuri bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi dinamika ekspor batu bara dan tanggapan negara pengimpor. Padahal, dalam lingkup perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang, DMO

berpotensi mempengaruhi volume ekspor, stabilitas pasokan, serta posisi tawar Indonesia dalam hubungan bilateral.

Gap inilah yang kemudian menjadi fokus utama dalam penelitian ini. berbeda dengan penelitian Walid dan Haykal yang menempatkan DMO dalam kerangka kebijakan energi nasional dan transisi energi domestik, penelitian yang saat ini diteliti mengkaji DMO dan kebijakan hilirisasi sebagai sarana negara yang secara langsung mempengaruhi dinamika perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang. Penelitian ini tidak hanya menelaah tujuan normative kebijakan DMO, tetapi juga menganalisis konsekuensi kebijakan tersebut terhadap hubungan perdagangan bilateral dan kepentingan energi negara pengimpor seperti Jepang. Dengan demikian, penelitian ini memperluas analisis DMO dari ranah domestik ke ranah ekonomi politik internasional.

Persamaan antara literatur studi Walid dan Haykal dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap peran negara dalam mengatur sektor energi strategis dan penggunaan DMO sebagai sarana kebijakan untuk melindungi kepentingan domestik. Keduanya sama-sama memandang DMO sebagai kebijakan yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan ketahanan energi nasional dan stabilitas ekonomi. Selain itu, kedua kajian juga menempatkan batu bara sebagai komoditas strategis yang memiliki implikasi luas terhadap kebijakan energi dan pembangunan nasional.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis dan lingkup kajian. Penelitian Walid dan Haykal berorientasi pada kebijakan energi nasional dan hubungan antara DMO batu bara dan pengembangan energi terbarukan, dengan penekanan pada implikasi domestik. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menyoroti dampak kebijakan DMO dan hilirisasi terhadap perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang, serta bagaimana kebijakan domestik Indonesia berinteraksi dengan kepentingan energi dan strategi perdagangan negara mitra. Dengan memasukkan dimensi hilirisasi dan perdagangan bilateral, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai peran kebijakan energi dalam membentuk relasi ekonomi internasional.

Dengan demikian, penelitian Walid dan Haykal memberikan kontribusi penting dalam memahami DMO sebagai bagian dari kebijakan energi nasional dan transisi

energi Indonesia. Sementara penelitian ini, melengkapi literature tersebut dengan analisis yang lebih spesifik terhadap dampak kebijakan tersebut dalam lingkup perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang. Integrasi kedua perspektif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai implikasi kebijakan DMO dan hilirisasi, baik pada level domestik maupun dalam hubungan perdagangan internasional.

Lalu pada **literatur ketiga**, terdapat penelitian yang ditulis oleh Lena Tria dkk dengan judul “*Coal Domestic Market Obligation (DMO) Policy Implementation in Indonesia to Achieve Energy Security*” (Lena Tria Melati et al., 2022). Literatur ketiga ini secara eksplisit memfokuskan kajiannya pada implementasi kebijakan DMO batu bara sebagai sarana utama dalam upaya mencapai ketahanan energi nasional Indonesia. Studi ini menempatkan DMO dalam kerangka konseptual *energy security* dengan menekankan pentingnya ketersediaan pasokan energi yang stabil, terjangkau, dan keberlanjutan bagi perekonomian nasional. Dalam analisisnya, Lena Tria et al., melihat bahwa kebijakan DMO muncul sebagai tanggapan negara terhadap ketergantungan sistem kelistrikan nasional pada batu bara serta tingginya orientasi ekspor perusahaan tambang yang berpotensi mengancam pasokan domestik ketika harga global meningkat.

Topik utama yang dibahas dalam penelitian ini mencakup desain kebijakan DMO, mekanisme implementasinya di tingkat nasional, serta efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung ketahanan energi Indonesia. Lena Tria et al., menguraikan bagaimana DMO dirancang untuk memastikan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik domestik, khususnya bagi PLN, melalui kewajiban pemenuhan volume dan penetapan harga tertentu. Kebijakan ini dianalisis sebagai bentuk intervensi negara yang bertujuan mengoreksi kegagalan pasar, di mana mekanisme pasar global cenderung mendorong produsen batu bara untuk memprioritaskan ekspor dibandingkan pemenuhan kebutuhan domestik. Dalam lingkup ini, DMO dipahami sebagai kebijakan strategis yang menempatkan kepentingan nasional di atas logika keuntungan ekonomi jangka pendek.

Adapun temuan penting dalam penelitian ini ialah mencakup implementasi DMO memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas pasokan energi

domestik, terutama pada sektor ketenagalistrikan. Kebijakan ini dinilai mampu menekan risiko kelangkaan batu bara dan fluktuasi harga listrik yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan dalam implementasi DMO, seperti resistensi dari pelaku usaha, persoalan kepatuhan terhadap kewajiban pasokan, serta keterbatasan pengawasan dan penegakan regulasi. Dengan demikian, meskipun DMO berperan penting dalam mendukung ketahanan energi, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas institusional negara dalam mengelola dan mengawasi sektor batu bara. Studi ini memberikan kontribusi penting dengan menempatkan DMO bukan sekadar sebagai kebijakan perdagangan atau kebijakan sektoral batu bara, melainkan sebagai bagian integral dari strategi keamanan nasional di bidang energi. Dengan menggunakan perspektif *energy security*, penelitian ini memperkaya literatur kebijakan energi yang menekankan peran negara dalam menjamin keberlanjutan pasokan energi bagi kepentingan publik.

Meskipun demikian, penelitian Lena Tria et al. masih memiliki keterbatasan yang relevan untuk dikritisi dalam lingkup penelitian ini. Fokus analisis penelitian tersebut cenderung bersifat domestik dan institusional, dengan penekanan pada efektivitas implementasi DMO di dalam negeri. Studi ini belum secara mendalam mengaitkan kebijakan DMO dengan dinamika perdagangan batu bara internasional, khususnya dengan negara mitra utama seperti Jepang. Padahal, sebagai salah satu importir terbesar batu bara Indonesia, Jepang memiliki kepentingan strategis yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan DMO Indonesia, baik dalam hal volume pasokan, stabilitas kontrak jangka panjang, maupun strategi ketahanan energi Jepang.

Gap inilah yang kemudian menjadi pijakan utama bagi penelitian ini. Berbeda dengan penelitian Lena Tria et al. yang menitikberatkan pada pencapaian ketahanan energi nasional melalui DMO, penelitian ini memperluas ruang analisis dengan mengkaji bagaimana kebijakan DMO, bersama dengan kebijakan hilirisasi, mempengaruhi dinamika perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang. Penelitian ini tidak hanya melihat DMO sebagai sarana domestik untuk menjaga pasokan energi,

tetapi juga sebagai kebijakan yang memiliki implikasi eksternal terhadap hubungan perdagangan bilateral dan posisi tawar Indonesia dalam pasar energi internasional.

Persamaan antara penelitian Lena Tria et al. dan penelitian ini terletak pada fokus terhadap kebijakan DMO sebagai sarana strategis negara dalam pengelolaan sumber daya energi. Keduanya sama-sama memandang DMO sebagai kebijakan yang lahir dari kebutuhan untuk melindungi kepentingan nasional dan menjamin stabilitas energi domestik. Selain itu, kedua kajian juga mengakui bahwa batu bara masih memainkan peran sentral dalam sistem energi Indonesia, meskipun terdapat tekanan global menuju transisi energi.

Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada lingkup dan lingkup analisis. Penelitian Lena Tria et al. berfokus pada implementasi DMO dan kontribusinya terhadap ketahanan energi nasional dari perspektif kebijakan domestik. Sementara itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis DMO dengan kebijakan hilirisasi dan dinamika perdagangan batu bara Indonesia dan Jepang, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dan kritis mengenai interaksi antara kebijakan energi domestik dan perdagangan internasional. Dengan memasukkan dimensi hilirisasi, penelitian ini juga menyoroti bagaimana upaya peningkatan nilai tambah domestik berpotensi mengubah struktur perdagangan batu bara dan hubungan Indonesia dengan negara pengimpor seperti Jepang.

Dengan demikian, penelitian Lena Tria et al. memberikan fondasi teoritis dan empiris yang kuat dalam memahami DMO sebagai sarana pencapaian ketahanan energi nasional, sementara penelitian ini berupaya melengkapi dan memperluas analisis tersebut dengan memasukkan dimensi perdagangan bilateral dan strategi hilirisasi. Integrasi kedua perspektif ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi kebijakan DMO, baik dalam lingkup domestik maupun dalam dinamika perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang.

Dan pada **literatur keempat**, berjudul “**Analisis Ekspor Batubara Indonesia**” yang di tulis oleh Melawati Puspita Dewi (Melawati Puspita Dewi, 2018). Berfokus pada kajian mengenai karakteristik, determinan, dan dinamika ekspor batu bara Indonesia dalam sistem perdagangan internasional. Studi ini menempatkan batu bara sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang memiliki kontribusi

signifikan terhadap penerimaan devisa dan kinerja sektor pertambangan nasional. Dalam analisisnya, Melawati menekankan bahwa ekspor batu bara Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti ketersediaan cadangan, biaya produksi yang relatif rendah, permintaan global yang tinggi, serta fluktuasi harga energi internasional. Pendekatan ini menempatkan ekspor batu bara terutama dalam kerangka ekonomi perdagangan dan kinerja ekspor nasional.

Topik utama yang dibahas dalam penelitian Melawati mencakup perkembangan ekspor batu bara Indonesia, faktor-faktor yang memengaruhi volume dan nilai ekspor, serta posisi Indonesia dalam pasar batu bara global. Penelitian ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang kuat dalam produksi dan ekspor batu bara, sehingga mampu menjadi salah satu eksportir terbesar dunia. Dalam lingkup ini, ekspor dipahami sebagai strategi utama pemanfaatan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Analisis Melawati menunjukkan bahwa permintaan dari negara-negara pengimpor utama, termasuk negara industri di Asia Timur seperti Jepang, berperan penting dalam membentuk pola ekspor batu bara Indonesia.

Temuan penting dari penelitian Melawati menegaskan bahwa orientasi ekspor batu bara Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global, khususnya perubahan harga internasional dan permintaan energi dari negara pengimpor. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan terhadap ekspor batu bara menjadikan sektor ini rentan terhadap fluktuasi eksternal, baik dari sisi harga maupun kebijakan energi negara pengimpor. Dalam lingkup perdagangan dengan Jepang, temuan ini relevan karena Jepang merupakan salah satu pasar utama batu bara Indonesia yang permintaannya relatif stabil, terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik. Namun, penelitian Melawati lebih menekankan aspek ekonomi ekspor dan belum secara eksplisit mengaitkannya dengan kebijakan domestik Indonesia seperti Domestic Market Obligation (DMO) dan hilirisasi.

Studi ini memberikan kontribusi penting dalam literatur perdagangan internasional dengan menyajikan gambaran empiris mengenai posisi strategis batu bara dalam struktur ekspor Indonesia. Dengan menyoroti peran pasar global dan

negara pengimpor utama, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai bagaimana ekspor batu bara menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Namun demikian, lebih berfokus pada dimensi ekonomi perdagangan, bukan pada analisis kebijakan energi atau intervensi negara.

Di sisi lain, penelitian Melawati juga memiliki keterbatasan yang menjadi celah penelitian jika dikaitkan dengan penelitian ini. Studi tersebut belum membahas secara mendalam implikasi kebijakan domestik Indonesia terhadap ekspor batu bara, khususnya kebijakan DMO dan hilirisasi yang secara langsung mempengaruhi volume dan struktur ekspor. Selain itu, penelitian Melawati belum mengaitkan dinamika ekspor batu bara dengan kepentingan strategis negara pengimpor, seperti Jepang, dalam kerangka ketahanan energi dan hubungan perdagangan bilateral. Dengan demikian, aspek ekonomi politik perdagangan batu bara dan peran negara sebagai regulator belum menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut.

Gap inilah yang kemudian dijawab oleh penelitian ini. Berbeda dengan penelitian Melawati yang menitikberatkan pada analisis ekspor batu bara dari perspektif ekonomi perdagangan, penelitian ini mengkaji ekspor batu bara Indonesia dalam lingkup kebijakan DMO dan hilirisasi serta implikasinya terhadap perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang. Penelitian ini tidak hanya menganalisis bagaimana ekspor batu bara berkembang, tetapi juga bagaimana negara Indonesia secara aktif mengatur ekspor tersebut melalui kebijakan domestik untuk menjamin pasokan energi dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Dengan demikian, penelitian ini memperluas analisis ekspor batu bara dari ranah ekonomi menjadi ranah ekonomi politik dan kebijakan energi.

Persamaan antara penelitian Melawati dan penelitian ini terletak pada fokus terhadap batu bara sebagai komoditas ekspor strategis dan peran penting pasar internasional, termasuk Jepang, dalam menyerap produksi batu bara Indonesia. Keduanya sama-sama mengakui bahwa ekspor batu bara memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan dipengaruhi oleh dinamika permintaan global. Selain itu, kedua penelitian juga menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam pasar batu bara internasional.

Adapun perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis dan variabel yang digunakan. Penelitian Melawati berorientasi pada analisis ekonomi ekspor dan faktor pasar, sementara penelitian ini mengintegrasikan analisis ekspor dengan kebijakan DMO dan hilirisasi sebagai bentuk intervensi negara dalam perdagangan komoditas strategis. Penelitian ini juga secara khusus menyoroti hubungan perdagangan batu bara Indonesia dan Jepang dan implikasi kebijakan domestik Indonesia terhadap kepentingan energi negara pengimpor. Dengan memasukkan dimensi kebijakan dan hubungan bilateral, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih kritis dan kontekstual dibandingkan penelitian Melawati.

Dengan demikian, penelitian Melawati memberikan dasar empiris yang kuat mengenai kinerja dan karakteristik ekspor batu bara Indonesia, sementara penelitian ini melengkapi dan memperluas analisis tersebut dengan menempatkan ekspor batu bara dalam kerangka kebijakan DMO, hilirisasi, dan dinamika perdagangan Indonesia ke Jepang. Integrasi kedua perspektif ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran ekspor batu bara dalam kebijakan energi dan perdagangan internasional Indonesia.

Yang kelima, ditulis oleh Ricky J.T. Manurung dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Daya Saing Ekspor Batubara Indonesia di Pasar Internasional**” (Ricky J.T. Manurung, 2023). Penulis ini berfokus pada kajian mengenai posisi kompetitif batu bara Indonesia dalam pasar global dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat daya saing ekspornya. Studi ini menempatkan daya saing sebagai konsep sentral yang merefleksikan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar batu bara di tengah persaingan dengan negara eksportir lain, seperti Australia dan Rusia. Dalam kerangka analisisnya, Manurung melihat ekspor batu bara sebagai aktivitas ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar internasional, struktur biaya produksi, serta kondisi makroekonomi global.

Topik utama yang dibahas dalam penelitian ini mencakup determinan daya saing ekspor batu bara Indonesia, seperti harga ekspor, kualitas batu bara, biaya produksi dan transportasi, nilai tukar, serta permintaan global. Manurung menekankan bahwa keunggulan utama Indonesia terletak pada biaya produksi yang relatif rendah dan

kedekatan geografis dengan pasar utama di Asia, termasuk Jepang. Faktor-faktor tersebut memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan posisi strategisnya sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa daya saing ekspor bersifat dinamis dan sangat bergantung pada kondisi eksternal, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan perubahan kebijakan negara pengimpor.

Temuan penting dari penelitian Manurung menunjukkan bahwa daya saing ekspor batu bara Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh faktor harga dan biaya, serta stabilitas permintaan dari negara pengimpor utama. Dalam lingkup perdagangan dengan Jepang, stabilitas kontrak dan konsistensi pasokan menjadi faktor penting yang mendukung daya saing Indonesia di pasar Jepang. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan atau gangguan pasokan dapat berdampak langsung terhadap persepsi daya saing Indonesia. Namun demikian, analisis Manurung cenderung memposisikan negara sebagai aktor yang relatif pasif, sementara mekanisme pasar dan faktor ekonomi dianggap sebagai penentu utama daya saing. Studi ini memberikan kontribusi empiris yang penting dalam literatur perdagangan internasional dengan memetakan variabel-variabel ekonomi yang menentukan posisi kompetitif batu bara Indonesia. Pendekatan ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana daya saing ekspor dibentuk oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, khususnya dalam lingkup komoditas energi.

Meskipun demikian, penelitian Manurung juga memiliki keterbatasan yang menjadi celah penelitian jika dikaitkan dengan penelitian ini. Studi tersebut belum mengkaji secara mendalam peran kebijakan domestik Indonesia, seperti kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan hilirisasi, dalam membentuk daya saing ekspor batu bara. Kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi mempengaruhi volume ekspor, struktur biaya, dan persepsi pasar internasional terhadap stabilitas pasokan Indonesia. Selain itu, penelitian Manurung belum mengaitkan analisis daya saing dengan hubungan perdagangan bilateral secara spesifik, khususnya dengan Jepang sebagai salah satu pasar utama batu bara Indonesia.

Gap inilah yang kemudian menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Berbeda dengan penelitian Manurung yang menitikberatkan pada faktor-faktor ekonomi dan

mekanisme pasar dalam menentukan daya saing ekspor, penelitian ini mengintegrasikan analisis daya saing dengan kebijakan DMO dan hilirisasi sebagai sarana negara dalam mengatur perdagangan batu bara. Penelitian ini juga menempatkan hubungan perdagangan Indonesia–Jepang sebagai lingkup empiris utama untuk memahami bagaimana kebijakan domestik Indonesia mempengaruhi daya saing, posisi tawar, dan keberlanjutan hubungan perdagangan batu bara dengan negara pengimpor utama.

Persamaan antara penelitian Manurung dan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap ekspor batu bara sebagai komponen penting perekonomian nasional dan posisi Indonesia dalam pasar batu bara internasional. Keduanya sama-sama mengakui peran penting pasar Asia, termasuk Jepang, dalam menyerap ekspor batu bara Indonesia. Selain itu, kedua penelitian juga menempatkan daya saing sebagai konsep penting dalam memahami dinamika ekspor batu bara.

Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan analisis dan variabel yang ditekankan. Penelitian Manurung menggunakan pendekatan ekonomi perdagangan yang berfokus pada faktor pasar dan biaya, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik dan kebijakan energi dengan menempatkan negara sebagai aktor sentral. Penelitian ini juga secara eksplisit mengkaji dampak kebijakan DMO dan hilirisasi terhadap dinamika perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang, sehingga memberikan perspektif yang lebih kritis terhadap peran kebijakan domestik dalam membentuk daya saing ekspor.

Dengan demikian, penelitian Manurung memberikan landasan empiris yang penting mengenai faktor-faktor daya saing ekspor batu bara Indonesia, sementara penelitian ini melengkapi dan memperluas analisis tersebut dengan memasukkan dimensi kebijakan DMO, hilirisasi, dan hubungan perdagangan bilateral Indonesia dan Jepang. Integrasi kedua perspektif ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perdagangan batu bara dan peran negara dalam mengelola daya saing komoditas strategis di pasar internasional.

lima penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu menyoroti peran sentral batubara dalam perekonomian Indonesia dan

keamanan energi nasional. Hampir semua penelitian menekankan bahwa meskipun adanya transisi global menuju energi terbarukan, batubara masih memegang posisi strategis, baik sebagai sumber devisa ekspor maupun sebagai penopang energi domestik. Penelitian oleh Yasin et al. (2021), Walid Siagian & Haykal (2024), serta Lena Tria Melati et al. (2022) menekankan pentingnya kebijakan *Domestic Market Obligation* dan hilirisasi sebagai sarana kebijakan energi Indonesia. Sementara itu, penelitian oleh Melawati Puspita Dewi (2018) dan Ricky J.T. Manurung (2023) juga menegaskan faktor daya saing ekspor yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika harga global dan kebijakan domestik.

Perbedaan utama yaitu terletak pada pendekatan, fokus analisis, skala penelitian, serta metodologi. Penelitian oleh Yasin et al. (2021), Walid Siagian & Haykal (2024) menekankan integrasi kebijakan DMO dan hilirisasi dengan agenda transisi energi global, sementara penelitian ini lebih menekankan dampak kebijakan tersebut dalam lingkup perdagangan bilateral Indonesia dan Jepang. Lalu, Lena Tria Melati et al. (2022) lebih spesifik pada dampak DMO terhadap keamanan energi domestik, tidak menyoroti implikasi internasionalnya. Serta Melawati Puspita Dewi (2018) dan Ricky J.T. Manurung (2023) lebih fokus pada daya saing ekspor dan faktor harga.

Sebagai upaya memperkuat kebaharuan dari penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan 5 pembandingan yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

No.	Judul	Penulis	Topik	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Implementation of Indonesia Coal Downstream Policy in the Trend of Fossil Energy Transition</i>	Yasin et al., 2021	Hilirisasi batubara dan transisi energi	Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan penggunaan batubara secara domestik. Kebijakan ini diberlakukan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengurangi penggunaan pada energi fosil dan menghadapi hambatan pasar global. Sehingga kebijakan ini berdampak positif untuk pasar domestik untuk mengembangkan industri batubara yang berkelanjutan	Membahas hilirisasi batubara dan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam	Fokus pada transisi energi dan pengurangan penggunaan energi fosil
2	<i>Coal Domestic Market Obligation (DMO) Policy Implementation in Indonesia to Achieve Energy Security</i>	Lena Tria Melati et al., 2022	Keamanan energi dan kebijakan DMO batubara	Kebijakan DMO bertujuan untuk mengatasi krisis energi yang terjadi pada tahun 2022. Meskipun kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap keamanan energi, terdapat hambatan yang terjadi terkait pelaksanaan kebijakan dan pemenuhan kewajiban DMO oleh produsen	Membahas kebijakan DMO dan dampaknya terhadap keamanan energi	fokus pada aspek keamanan energi secara umum
3	Analisis Ekspor Batubara	Melawati Puspita Dewi, 2018	Daya saing ekspor batubara Indonesia	Harga batubara memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor batubara Indonesia, hal ini disebabkan karena harga yang lebih tinggi menarik minat pembeli dari negara tujuan, sehingga produsen	Membahas faktor yang mempengaruhi ekspor batubara Indonesia	Fokus pada harga batubara dan daya saing di pasar internasional

				batubara meningkatkan produksi dan ekspor. Selain faktor pengaruh harga batubara, terdapat faktor lain yaitu GDP negara tujuan, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, harga batubara Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar Internasional.		
4	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Ekspor Batubara Indonesia di Pasar Internasional	Ricky J.T. Manurung, 2023	Daya saing ekspor batubara	Dengan menggunakan metode regresi linier berganda, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam ekspor batubara, yang di pengaruhi oleh harga internasional dan kebijakan domestik.	Membahas daya saing ekspor batubara Indonesia	Membahas faktor daya saing secara umum
5	Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation Batubara dan Energi Terbarukan	walid siagian & haykal, 2024	Kebijakan energi nasional	Kebijakan DMO batubara berpotensi untuk meningkatkan pemenuhan energi domestik, namun terjadi dilema karena ketidakstabilan antara realisasi domestik dan ekspor. Oleh karenanya, kebijakan energi terbarukan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, dengan potensi EBT yang besar tetapi realisasi yang rendah.	Menganalisis implikasi kebijakan DMO terhadap sektor energi	Menyoroti hambatan dalam pengembangan energi terbarukan

2. 2 Kerangka Teoritis-Konseptual

2.2. 1 Neo-Merkantilisme

Pendekatan Neo-Merkantilisme merupakan salah satu aliran penting dalam Ekonomi Politik Internasional yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengelola dan mengarahkan aktivitas ekonomi lintas batas demi pencapaian kepentingan nasional. Berbeda dengan liberalisme yang menekankan efisiensi pasar dan minimnya intervensi negara, neo-merkantilisme berpandangan bahwa perdagangan internasional bersifat kompetitif dan asimetris, sehingga negara perlu hadir secara aktif untuk melindungi sektor strategis, mengamankan sumber daya vital, serta menjaga posisi tawar dalam sistem ekonomi global (Gilpin, 2001). Dalam perspektif ini, keuntungan ekonomi tidak dipahami hanya sebagai hasil mekanisme pasar, melainkan sebagai sarana kekuasaan yang memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas politik, keamanan nasional, dan kapasitas pembangunan jangka panjang suatu negara.

Neo-merkantilisme lahir sebagai tanggapan atas keterbatasan paradigma liberal dalam menjelaskan praktik nyata kebijakan ekonomi negara-negara modern, terutama negara berkembang dan negara kaya sumber daya alam. Seperti yang di kemukakan oleh Gilpin (1987), negara tidak pernah sepenuhnya menyerahkan sektor strategis kepada pasar bebas karena terdapat kepentingan nasional yang tidak dapat direduksi menjadi logika keuntungan ekonomi semata (Alputra Sudirman, 2016). Energi, pangan, dan sumber daya alam termasuk dalam kategori komoditas strategis yang menuntut adanya intervensi negara. Dalam hal ini, perdagangan tidak selalu diarahkan untuk memaksimalkan ekspor, melainkan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi domestik, menjaga ketahanan nasional, serta memperkuat struktur industri dalam negeri.

Dalam kerangka neo-merkantilisme, kebijakan perdagangan dipahami sebagai sarana negara untuk mengatur arus keluar-masuk komoditas strategis agar sejalan dengan prioritas nasional. Negara dapat membatasi ekspor, mengatur harga domestik, atau menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri sebagai bentuk kontrol terhadap sumber daya strategis tanpa harus sepenuhnya menutup diri dari pasar global (Susan Strange, 1994). Pola inilah yang kemudian relevan untuk

menjelaskan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) batu bara yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. DMO bukanlah kebijakan proteksionisme keras yang menutup ekspor secara total, melainkan proteksionisme moderat yang mengatur prioritas distribusi sumber daya demi kepentingan domestik, dengan tetap mempertahankan keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional.

Dalam lingkup Indonesia, batu bara memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai komoditas ekspor utama, tetapi juga sebagai tulang punggung sistem ketenagalistrikan nasional. Ketergantungan pembangkit listrik dalam negeri terhadap batu bara menempatkan negara dalam posisi yang rentan apabila pasokan domestik sepenuhnya diserahkan dan dialihkan kepada mekanisme pasar ekspor. Fenomena krisis pasokan batu bara untuk PLN yang mengancam pemadaman listrik pada 10 Juta rumah di wilayah Indonesia pada awal tahun 2022 menjadi ilustrasi nyata bagaimana orientasi ekspor yang terlalu dominan dapat mengancam ketahanan energi nasional (ESDM, 2022a). Dalam persepektif neo-merkantilisme, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan pasar dalam melindungi kepentingan nasional sehingga intervensi negara melalui kebijakan DMO menjadi rasional dan legitim (Gilpin, 2001).

Kebijakan DMO yang mewajibkan produsen batu bara memasok sebagai produksinya untuk kebutuhan domestik dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah mencerminkan logika neo-merkantilisme yang menempatkan stabilitas domestik di atas kepentingan pasar internasional. Negara secara sadar membatasi fleksibilitas ekspor demi menjamin ketersediaan energi murah bagi industri dan rumah tangga dalam negeri. Namun demikian, kebijakan ini tidak menghapus peran ekspor sepenuhnya. Indonesia tetap menjadi eksportir batu bara utama di dunia, termasuk ke Jepang, yang menandakan bahwa DMO berfungsi sebagai sarana atau alat dalam pengendalian selektif, bukan penolakan terhadap perdagangan bebas secara total. Inilah yang menegaskan karakter DMO sebagai proteksionisme moderat dalam kerangka neo-merkantilisme.

Hubungan perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang memberikan lingkup empiris yang kuat untuk memahami dinamika ini. Jepang sebagai negara industri ketergantungan tinggi terhadap impor batu bara demi menjaga ketahanan

energinya, terutama pasca menurunnya peran energi nuklir setelah bencana Fukushima (Yergin, 2006). Dalam perspektif neo-merkantilisme Jepang, diversifikasi pemasok dan kontrak jangka panjang dengan Indonesia merupakan strategi untuk mengurangi resiko geopolitik dan pasar. Namun, ketika Indonesia menerapkan DMO dan memperketat pengaturan ekspor, Jepang dihadapkan dilema pada realitas bahwa negara pemasok memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur sumber daya strategisnya.

Situasi ini menunjukkan bahwa perdagangan batu bara Indonesia dan Jepang tidak hanya tentang adanya dorongan oleh logika saling menguntungkan secara ekonomi, melainkan juga oleh pertarungan kepentingan nasional masing-masing negara. Indonesia menggunakan kebijakan DMO sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan energi domestik dan menstabilkan harga dalam negeri, sementara Jepang memberikan tanggapan dengan strategi adaptif seperti diversifikasi sumber impor dan peningkatan kerja sama teknologi energi bersih. Interaksi ini sejalan dengan pandangan neo-merkantilisme yang melihat perdagangan internasional sebagai arena negosiasi kekuasaan, bukan hanya sekadar pertukaran komoditas (Susan Strange, 1994).

Selanjutnya, kebijakan hilirisasi batu bara memperkuat dimensi neo-merkantilisme dalam strategi ekonomi Indonesia. Hilirisasi bertujuan menggeser posisi Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi negara yang mengendalikan rantai nilai produksi. Dalam perspektif neo-merkantilisme, peningkatan nilai tambah domestik merupakan strategi fundamental untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga global (Chang, 2002). Dengan mendorong pengolahan batu bara menjadi produk turunan seperti gasifikasi atau DME, negara berupaya mengunci manfaat ekonomi di dalam negeri sekaligus meningkatkan posisi tawar dalam hubungan perdagangan internasional.

Bagi Jepang, agenda hilirisasi batu bara Indonesia menandai perubahan struktur hubungan perdagangan energi. Jepang tidak lagi hanya berperan sebagai pembeli bahan mentah, tetapi berpotensi menjadi mitra investasi dan teknologi dalam pengembangan industri hilir batu bara dan transisi energi rendah karbon. Dalam

kerangka neo-merkantilisme, perubahan ini mencerminkan transformasi relasi dari hubungan transaksional menuju hubungan strategis yang sarat dengan kepentingan nasional jangka panjang. Indonesia memperkuat kedaulatan ekonominya melalui kontrol atas sumber daya dan proses produksi, sementara Jepang menyesuaikan strategi ketahanan energinya agar tetap kompatibel dengan kebijakan domestik negara pemasok.

Dengan demikian, pendekatan neo-merkantilisme memberikan landasan analitis yang kuat untuk memahami kebijakan DMO dan hilirisasi dalam lingkup perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang. DMO sebagai bentuk proteksionisme moderat mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan keterbukaan ekonomi dengan perlindungan kepentingan domestik. Hilirisasi memperdalam strategi tersebut dengan mengarahkan perdagangan pada peningkatan nilai tambah dan penguatan struktur industri nasional. Dalam dinamika ini perdagangan batu bara tidak lagi hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi netral, melainkan sebagai sarana atau alat kebijakan negara yang sarat dengan dimensi kekuasaan, keamanan energi, dan strategi pembangunan nasional.

2.2. 2 Ekspor-Import Batu Bara

Teori ekspor-impor dalam kajian ekonomi politik internasional memandang perdagangan lintas negara bukan semata sebagai aktivitas pertukaran barang untuk memperoleh keuntungan ekonomi, melainkan sebagai proses yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, kebijakan negara, dan kepentingan strategis jangka panjang. Dalam komoditas energi seperti batu bara, aktivitas ekspor-impor memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan perdagangan barang manufaktur biasa, karena energi berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan keberlanjutan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, teori ekspor-impor modern tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai regulator utama yang mengarahkan arus perdagangan sesuai dengan kepentingan nasionalnya (Krugman et al., 2018).

Dalam teori perdagangan internasional klasik, ekspor dan impor dijelaskan melalui konsep keunggulan komparatif, di mana negara akan mengekspor komoditas yang dapat di produksi dengan biaya relatif lebih rendah dan mengimpor

komoditas yang tidak efisien diproduksi secara domestik (David Ricardo, 1817). Indonesia, sebagai negara dengan cadangan batu bara yang melimpah dan biaya produksi relatif rendah, secara alamiah memiliki keunggulan komparatif dalam ekspor batu bara. Sebaliknya, Jepang sebagai negara industri maju dengan keterbatasan sumber daya energi domestik memiliki ketergantungan struktural terhadap impor batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan industri beratnya. Relasi ini membentuk pola ekspor-impor yang saling melengkapi secara ekonomi. Namun, pendekatan keunggulan komparatif ini tidak cukup untuk menjelaskan dinamika kontemporer perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang, terutama ketika negara mulai menerapkan kebijakan domestik yang bersifat intervensif seperti *Domestic Market Obligation* (DMO) dan hilirisasi.

Dalam teori ekspor-impor modern, negara tidak dipandang sebagai aktor pasif yang tunduk pada mekanisme pasar internasional, melainkan sebagai aktor aktif yang menggunakan kebijakan perdagangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan stabilitas domestik. Menurut Alfred, (2017), ekspor-impor komoditas strategis sering kali diatur melalui kebijakan kuota, kewajiban pasokan domestik, pengendalian harga, serta regulasi investasi, terutama ketika komoditas tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keamanan energi nasional. Dengan demikian, arus ekspor batu bara Indonesia ke Jepang tidak hanya ditentukan oleh permintaan dan harga global, tetapi juga oleh keputusan politik dan kebijakan energi pemerintah Indonesia.

Kebijakan DMO secara langsung mempengaruhi mekanisme ekspor-impor batu bara dengan menempatkan prioritas pemenuhan kebutuhan domestik di atas kepentingan ekspor. Dalam perspektif teori ekspor-impor, DMO merepresentasikan bentuk distorsi pasar yang disengaja oleh negara untuk mengoreksi kegagalan pasar internasional dalam menjamin ketersediaan energi domestik. Ketika harga batu bara global meningkat, perusahaan tambang cenderung mengalihkan pasokan ke pasar ekspor demi keuntungan maksimal. Namun, logika pasar ini berpotensi mengancam pasokan energi nasional, sebagaimana tercermin dalam krisis pasokan batu bara domestik pada 2021-2022. Oleh karena itu, negara hadir untuk mengatur

ulang arus ekspor-impor agar sejalan dengan kepentingan nasional (Krugman et al., 2018).

Dalam hubungan perdagangan Indonesia dan Jepang, penerapan DMO mengubah pola tradisional ekspor-impor yang sebelumnya relatif stabil. Jepang, yang selama bertahun-tahun mengandalkan Indonesia sebagai pemasok utama batu bara *thermal*, harus menyesuaikan strategi impornya ketika Indonesia membatasi ekspor demi memenuhi kebutuhan domestik. Dalam teori ekspor-impor strategis, kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan impor menciptakan kerentanan struktural bagi negara pengimpor, terutama negara eksportir memiliki kapasitas regulatif yang kuat (Yergin, 2006). Jepang memberikan reaksi pada kebijakan DMO Indonesia dengan diversifikasi sumber impor, penguatan kontrak jangka panjang, serta peningkatan kerja sama energi yang lebih luas, termasuk pada teknologi rendah karbon.

Selain DMO, kebijakan hilirisasi turut mengubah struktur ekspor-impor batu bara secara fundamental. Dalam teori perdagangan internasional berbasis nilai tambah, ekspor bahan mentah cenderung memberikan manfaat ekonomi yang lebih rendah dibandingkan ekspor produk olahan, karena sebagian nilai ekonomi dinikmati oleh negara pengolah (Chang, 2002). Hilirisasi batu bara Indonesia bertujuan untuk menggeser posisi Indonesia dalam rantai nilai global dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi produsen energi dan produk turunan bernilai tambah tinggi. Dengan meningkatnya konsumsi domestik batu bara untuk keperluan industri hilir, volume batu bara yang tersedia untuk ekspor berpotensi menurun dalam jangka panjang.

Bagi Jepang, kebijakan hilirisasi Indonesia memiliki implikasi langsung terhadap pola impor batu bara. Dalam jangka pendek, Jepang masih membutuhkan batu bara Indonesia untuk menjaga stabilitas pasokan energi selama masa transisi menuju energi bersih. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, pengurangan ekspor batu bara mentah akibat hilirisasi mendorong Jepang untuk mengadaptasi kebijakan impornya. Dalam kerangka teori ekspor-impor adaptif, negara pengimpor tidak hanya bereaksi terhadap perubahan volume pasokan, tetapi juga mencari bentuk kerja sama baru yang lebih kompatibel dengan kepentingan strategisnya

(Appleyard & Field, 2014). Hal ini terlihat dari meningkatnya ketertarikan Jepang terhadap investasi dan transfer teknologi dalam proyek hilirisasi batu bara Indonesia, seperti gasifikasi dan pengembangan energi rendah emisi.

Lebih jauh, teori ekspor-impor kontemporer menekankan bahwa perdagangan komoditas energi tidak lagi bersifat netral secara politik. Menurut J. Stopford (1991), hubungan perdagangan energi sering kali melibatkan negosiasi tiga aktor utama, yaitu negara, perusahaan, dan pasar global. Dalam lingkup Indonesia dan Jepang, kebijakan DMO dan hilirisasi menunjukkan bagaimana negara Indonesia memperkuat posisinya dalam segitiga tersebut dengan mengatur ulang kepentingan pasar dan perusahaan demi tujuan nasional. Jepang sebagai negara pengimpor, tidak berada pada posisi untuk sepenuhnya menolak kebijakan tersebut, tetapi harus bernegosiasi dan menyesuaikan strategi impornya agar ketahanan energinya tetap terjaga.

Dengan demikian, teori ekspor-impor batu bara memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dampak kebijakan DMO dan hilirisasi terhadap perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang. Ekspor dan impor tidak lagi dipahami sebagai arus perdagangan yang hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara kepentingan ekonomi, kebijakan domestik, dan strategi keamanan energi. Dalam dinamika ini, Indonesia menggunakan kebijakan perdagangan untuk mengamankan pasokan domestik dan meningkatkan nilai tambah nasional, sementara Jepang menyesuaikan kebijakan impornya untuk menjaga stabilitas energi ditengah perubahan struktur perdagangan global. Oleh karena itu, teori ekspor-impor menjadi landasan penting dalam menjelaskan bagaimana kebijakan domestik Indonesia membentuk ulang relasi perdagangan energi bilateral dengan Jepang secara struktural dan strategis.

2. 3 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian dalam kajian ini dibangun atas sintesis antara rumusan masalah penelitian, temuan empiris yang telah berkembang dalam literatur, serta kerangka neo-merkantilisme dan teori ekspor-impor batu bara yang telah dipaparkan sebelumnya. Berangkat dari rumusan masalah yang menyoroti bagaimana perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang mempengaruhi kebijakan

Domestic Market Obligation (DMO) dan hilirisasi, penelitian ini mengasumsikan bahwa kebijakan energi dan perdagangan batu bara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara kepentingan ekonomi domestik dan tekanan pasar internasional. Dengan demikian, asumsi penelitian ini menempatkan negara sebagai aktor utama yang secara aktif memberikan tanggapan dinamika perdagangan internasional melalui kebijakan intervensi yang bersifat strategis.

Berdasarkan bukti empiris yang ditunjukkan oleh penelitian terdahulu, terdapat kecenderungan kuat bahwa orientasi ekspor batu bara Indonesia meningkat seiring dengan tingginya permintaan dari negara-negara pengimpor utama, termasuk Jepang. Berbagai studi menunjukkan bahwa lonjakan harga batu bara internasional mendorong perusahaan tambang untuk memprioritaskan pasar ekspor, yang pada gilirannya menimbulkan risiko kekurangan pasokan di dalam negeri. Oleh karena itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa kebijakan DMO merupakan tanggapan negara terhadap ketidakseimbangan struktural antara kepentingan ekspor dan kebutuhan energi domestik. Dalam lingkup hubungan Indonesia dan Jepang, tingginya ketergantungan Jepang terhadap impor batu bara diasumsikan memperkuat tekanan eksternal terhadap Indonesia untuk mempertahankan volume ekspor, sekaligus memperbesar urgensi negara Indonesia untuk mengamankan pasokan domestik melalui regulasi.

Asumsi berikutnya diturunkan dari kerangka neo-merkantilisme yang menegaskan bahwa negara akan cenderung melakukan intervensi pada sektor-sektor strategis guna melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dalam kerangka ini, penelitian ini mengasumsikan bahwa kebijakan DMO tidak hanya bersifat administratif atau teknis, melainkan merupakan bentuk proteksionisme moderat yang dirancang untuk mempertahankan kontrol negara atas sumber daya energi strategis. Kebijakan tersebut diasumsikan berfungsi sebagai sarana untuk membatasi dampak negatif liberalisasi perdagangan batu bara terhadap ketahanan energi nasional, tanpa sepenuhnya menutup akses Indonesia terhadap pasar ekspor internasional, termasuk Jepang.

Selain itu, penelitian ini juga mengasumsikan bahwa kebijakan hilirisasi batu bara merupakan manifestasi lanjutan dari strategi neo-merkantilis negara dalam

mengoptimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya alam. Berdasarkan postulat penelitian terdahulu, ekspor bahan mentah dalam jangka panjang cenderung menghasilkan ketergantungan struktural dan rendahnya nilai tambah domestik. Oleh karena itu, penelitian ini berasumsi bahwa hilirisasi diposisikan sebagai upaya negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor batu bara mentah sekaligus memperkuat basis industri nasional. Dalam lingkup perdagangan Indonesia ke Jepang, asumsi ini mengimplikasikan bahwa kebijakan hilirisasi berpotensi mengubah pola hubungan dagang yang sebelumnya bersifat komplementer menjadi lebih negosiatif, terutama terkait akses pasar, kerja sama teknologi, dan investasi energi.

Asumsi lain yang mendasari penelitian ini adalah bahwa penerapan DMO dan hilirisasi tidak hanya berdampak pada aspek domestik, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap dinamika perdagangan bilateral Indonesia ke Jepang. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pasokan dari negara eksportir utama dapat mempengaruhi strategi ketahanan energi negara pengimpor. Oleh karena itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa kebijakan DMO Indonesia berpotensi menimbulkan penyesuaian kebijakan energi di Jepang, baik dalam bentuk diversifikasi sumber impor, peningkatan efisiensi energi, maupun penguatan kerja sama bilateral dengan Indonesia. Dalam perspektif ini, kebijakan domestik Indonesia diasumsikan memiliki daya pengaruh yang melampaui batas nasional dan menjadi faktor penting dalam dinamika energi regional.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengasumsikan adanya ketegangan inheren antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan tujuan strategis jangka panjang dalam pengelolaan batu bara Indonesia. Bukti empiris dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekspor batu bara memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara, namun pada saat yang sama dapat menghambat upaya transisi energi dan industrialisasi domestik. Oleh karena itu, penelitian ini berasumsi bahwa kebijakan DMO dan hilirisasi merupakan sarana kompromi yang digunakan negara untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Dalam lingkup perdagangan dengan Jepang, asumsi ini menegaskan bahwa hubungan dagang tidak hanya

ditentukan oleh logika pasar, tetapi juga oleh strategi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional Indonesia.

Dengan demikian, asumsi penelitian ini menegaskan bahwa dampak perdagangan batu bara Indonesia ke Jepang terhadap kebijakan DMO dan hilirisasi hanya dapat dipahami secara utuh apabila dianalisis melalui integrasi rumusan masalah, bukti empiris, kerangka teori, dan postulat penelitian terdahulu. Asumsi-asumsi tersebut menjadi dasar konseptual yang memandu penelitian ini dalam menafsirkan kebijakan DMO dan hilirisasi sebagai tanggapan strategis negara terhadap dinamika perdagangan internasional dan tuntutan ketahanan energi nasional. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis terhadap peran negara dalam mengelola sumber daya energi strategis di tengah tekanan global.

2. 4 Kerangka Analisis

